



Civil Apparatus POLICY BRIEF

Nomor: 058 April 2024

ISSN: 2541-4267

DIGITALISASI: JAWABAN REVITALISASI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Berdasarkan peringkat dalam Indeks Pengembangan *E-Government* (EGDI) Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-77 di kawasan Asia dengan nilai EGDI sebesar 0.7160 (lihat gambar 1). Indeks ini memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan

e-government di negara-negara anggota PBB dengan menilai pola pengembangan situs web dan menggabungkan aspek-aspek akses, seperti infrastruktur dan tingkat pendidikan. EGDI menjadi tolok ukur yang mencerminkan sejauh mana sebuah negara memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan inklusi masyarakatnya dengan melibatkan tiga dimensi kunci *e-government*, yaitu penyediaan layanan *online*, konektivitas telekomunikasi, dan kapasitas manusia.

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Transformasi digital merupakan jembatan penting antara organisasi pemerintahan dan menjadi landasan krusial dalam konteks pemerintahan di Indonesia.
- Indonesia menduduki peringkat ke-77 di Asia menurut Indeks Pengembangan *E-Government* (EGDI) PBB tahun 2022 yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan inklusi masyarakatnya.
- Transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien di dunia digital, di tengah tantangan kompleks di sektor publik yang memerlukan inovasi.
- Model DIKW (*Data, Information, Knowledge, Wisdom*) menjadi krusial dalam transformasi digital.
- *Agile methodologies, break down data silos, revisi strategi digital, kepemimpinan aktif dan komunikasi transparan* merupakan elemen penting dalam mendukung transformasi digital.

Menurut survei yang dilakukan *MIT Sloan Management Review* sebanyak 78% responden menyatakan bahwa mencapai transformasi digital akan menjadi hal yang sangat penting bagi organisasi mereka dalam dua tahun ke depan, menunjukkan urgensi perubahan digital dalam waktu yang relatif singkat. Transformasi digital bukan hanya menjadi jembatan penting antara organisasi pemerintah saat ini dan masa depan, tetapi juga menjadi landasan krusial dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Investasi digital semakin cepat, tantangan terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan masih ada. Oleh karena itu, pendekatan strategis terhadap transformasi digital untuk setiap organisasi pemerintah tidak hanya diperlukan untuk kemajuan, tetapi juga untuk mendukung semangat reformasi birokrasi.

Di sektor publik, transformasi digital sering kali berjalan seiring dengan perubahan lintas level yang berdampak pada berbagai komponen organisasi. Teknologi digital memiliki kekuatan yang mendalam untuk mengubah infrastruktur, produk, layanan, proses bisnis, model bisnis, dan strategi organisasi, termasuk hubungan antar organisasi dalam konteks organisasi yang lebih luas (Gong, Y, & Shi, X, 2020). Penggunaan kerangka kerja digital dalam tata kelola pemerintahan dapat mengurangi biaya dan upaya, serta meningkatkan operasi secara keseluruhan. Transformasi digital yang sukses akan memungkinkan sektor publik berfungsi lebih efisien dan efektif di dunia digital, serta menyediakan layanan publik yang lebih sederhana dan efektif (Greenway, A. et al, 2018). Pemerintahan global

Penulis	: Fanda Yurike
Penanggungjawab	: Haryanah
Redaktur	: Haryanah
Editor	: Katherin
Editor Bagian	: Azmi Listya Anisah, Ardy Firmansyah, Diana Ma'rifah
Design Grafis	: Moch. Ervin Permana
Sekretariat	: Ritauli Renyati Carissa Hanif A.
Alamat	: Jl. Mayjend Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur
Telp	: 021-80887011
e-mail	: ppm.asn@bkn.go.id

Gambar 1.
Negara-negara di Asia dengan nilai EGDI tertinggi

Country	Rating class	EGDI rank	Subregion	Online Service Index (OSI) value	Human Capital Index (HCI) value	Telecommunication Infrastructure Index (TII) value	EGDI (2022)
Republic of Korea	Very High	3	Eastern Asia	0.9826	0.9087	0.9674	0.9529
Singapore	Very High	12	South-Eastern Asia	0.9620	0.9021	0.8758	0.9133
Japan	Very High	14	Eastern Asia	0.9094	0.8765	0.9147	0.9002
China	Very High Class 2	43	Eastern Asia	0.8876	0.7429	0.8050	0.8119
Malaysia	Very High Class 1	53	South-Eastern Asia	0.7630	0.7645	0.7945	0.7740
Thailand	Very High Class 1	55	South-Eastern Asia	0.7763	0.7879	0.7338	0.7660
Brunei Darussalam	high-very high	68	South-Eastern Asia	0.5871	0.7567	0.8372	0.7270
Mongolia	high-very high	74	Eastern Asia	0.6263	0.8391	0.6973	0.7209
Indonesia	high-very high	77	South-Eastern Asia	0.7644	0.7438	0.6397	0.7160

Sumber: United Nations, *E-Government 2022*

melihat transformasi digital sebagai kebutuhan strategis untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, meningkatkan kinerja layanan, merampingkan operasional, dan mengembangkan model bisnis baru (Curtis, S, 2019).

Menurut McKinsey agar transformasi digital berhasil, organisasi perlu memahami masalah yang ingin diselesaikan dan mengatur ulang Struktur organisasi untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan. Dalam mengembangkan sebuah teknologi, akan ada efek sekunder di dalam sistem yang menghalangi organisasi untuk mendapatkan manfaatnya secara penuh. Meskipun kematangan digital dapat menjadi perjalanan yang menantang bagi organisasi, organisasi perlu beradaptasi secara *iteratif* untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi inovatif yang cepat.

TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital, awalnya didefinisikan dalam konteks bisnis sebagai respons perubahan lingkungan yang dipicu oleh teknologi digital seperti *mobile, cloud, big data, Artificial Intelligence (AI)*, dan *Internet of Things (IoT)* Meskipun transformasi digital utamanya terjadi dalam konteks industri yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dengan menggunakan teknologi yang ada atau yang baru dikembangkan, konsep pemerintahan digital berkembang dari proses pemerintah yang beradaptasi dengan inovasi digital. Sebagai hasilnya, banyak negara di seluruh dunia menerapkan kebijakan

pemerintahan digital dengan membentuk kementerian baru yang mengawasi inovasi digital (*National Information Society Agency*, 2019)

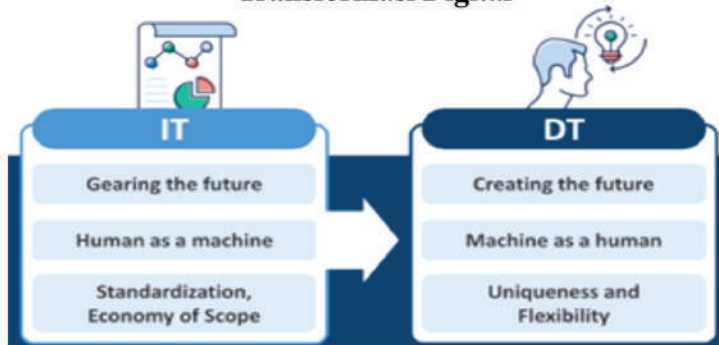
Menurut sebuah artikel di HBR's *10 Must Reads* organisasi yang ingin memaksimalkan hasil dari transformasi digital harus memahami peran teknologi, memprioritaskan rangkaian inisiatif berbasis kebutuhan organisasi, dan merencanakan skala penerapan di seluruh lembaga. Sebelum mengadopsi inisiatif kecerdasan buatan (AI), untuk mendapatkan nilai maksimal dari digitalisasi, diperlukan perancangan ulang operasional, yang dimulai dengan mengidentifikasi dan menjelaskan area operasional organisasi yang dapat ditingkatkan.

Transformasi digital adalah perubahan mendasar tentang bagaimana sebuah organisasi beroperasi. Proses ini tidak hanya penting untuk bersaing, tetapi juga untuk bertahan dalam era digital yang terus berkembang. Sukses dalam transformasi digital tidak dapat dicapai oleh para pemimpin kecuali mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep ini dan mampu menyelaraskan organisasi mereka dengan program-program tertentu (McKinsey, 2023).

Transformasi teknologi informasi dan transformasi digital sering dianggap bermakna sama, sehingga penting untuk memahami karakteristik Teknologi Informasi (IT) dan Transformasi Digital (DT) (lihat Gambar 2). Meskipun keduanya sering kali digunakan bersama, memahami perbedaan di antara keduanya akan membantu dalam merancang strategi yang tepat untuk kemajuan organisasi.

Gambar 2.

Karakteristik Teknologi Informasi dan Transformasi Digital



Sumber: National Information Society Agency (2019), *Digital Transformation and Digital Government*

Digital Governance

Digital Governance di negara berkembang menjamin akses informasi yang tersedia di jaringan digital, serta memastikan bahwa tidak ada yang dikecualikan dalam mengakses informasi di dalam jaringan tersebut. Menurut *National Information Society Agency*, akses ke informasi dapat dilakukan melalui tiga hal berikut:

1. Jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pribadi/individu seperti akses individu ke Internet.
2. Koneksi TIK publik seperti pusat internet komunitas, kantor pos, pusat informasi pemerintah.
3. Konvergensi model seperti relawan penyuluh, radio komunitas, dan koran lokal yang memiliki akses ke simpul TIK dan kemudian dapat menyampaikan informasi penting kepada pengguna yang ditargetkan secara tepat waktu.

Bakat dan keterampilan digital sangat penting untuk transformasi digital sektor publik yang efektif dan berkelanjutan. Untuk dapat sepenuhnya merangkul dan mengambil manfaat dari transformasi digital, pemerintah harus yakin bahwa terlibat dalam lingkungan digital akan membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian.

Kebijakan publik harus difokuskan pada peningkatan akses dan berbagi data, memastikan interoperabilitas ketentuan privasi untuk memfasilitasi aliran data lintas batas, serta membuka data pemerintah dengan meningkatkan inovasi digital yang memastikan bahwa masalah privasi dan keamanan dapat ditangani. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berhasil guna meningkatkan kepercayaan menurut ringkasan Konferensi Tingkat Tinggi Digital OECD, 2019.

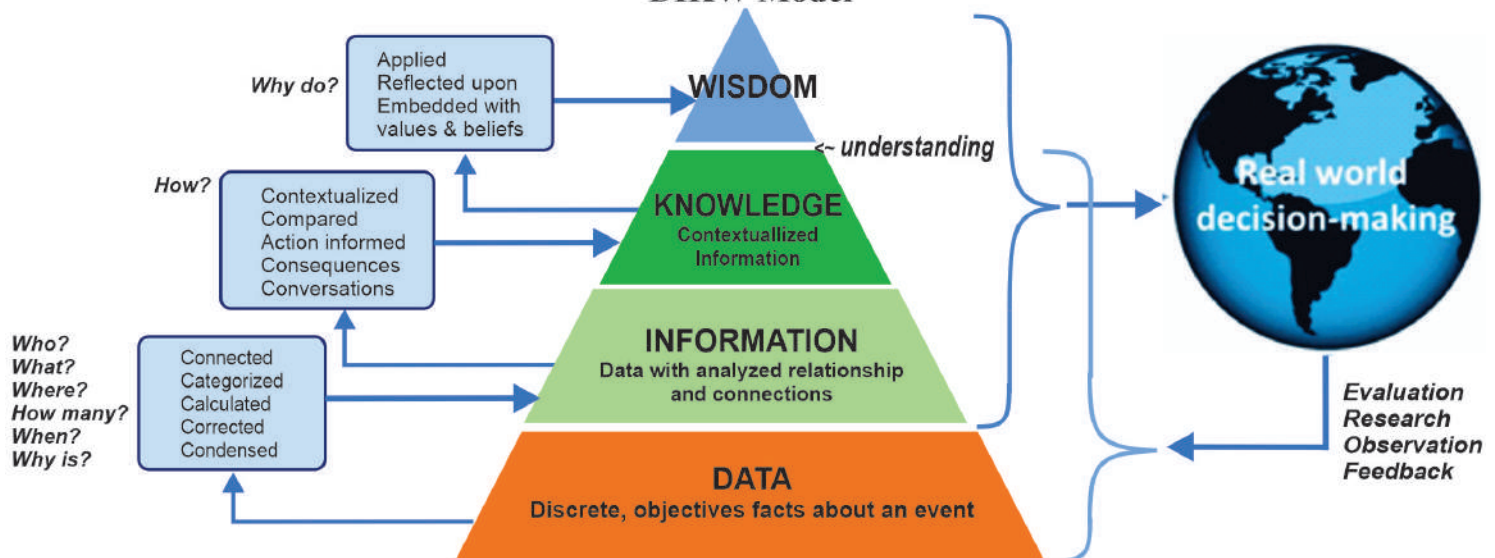
Model D-I-K-W

Dalam konteks digitalisasi, urgensi untuk menavigasi model DIKW (*Data, Information, Knowledge, Wisdom*) sangat penting dalam mengubah data menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti, dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan efektif.

Model DIKW menjadi inti dari transformasi digital, krusial dalam proses digitalisasi untuk memastikan ekstraksi nilai dari data dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang akurat, sebagaimana terlihat pada gambar 3.

Gambar 3.

DIKW Model



Sumber: Nam, Taewoo. (2022). Sungkyunkwan University.

GOLDEN RULES UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL YANG SUKSES

Prinsip-prinsip untuk mencapai keberhasilan dalam transformasi digital menurut sebuah tulisan di *Linked In*:

1. *Continous Learning*: Ciptakan budaya dimana pendidikan berkelanjutan dihargai sehingga pegawai dapat mengikuti perkembangan teknologi dan metode terbaru.
2. Menjunjung Tinggi Keamanan dan Privasi Data: Lindungi data *stakeholder* dengan menerapkan standar keamanan dan perlindungan privasi untuk menjaga kepercayaan dan kepatuhan.
3. Menerapkan *Agile Methodologies* Adopsi pendekatan yang dinamis dan adaptif terhadap *project management*, sehingga dapat mengulang dan adaptasi yang cepat dalam lanskap digital yang terus berubah.
4. *Break Down Data Silos*: Mendorong lingkungan kolaboratif dimana informasi mudah dibagikan di seluruh unit untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan menciptakan gambaran instansi yang kohesif.
5. Merevisi Strategi Digital Secara Teratur: *Assess* dan menyempurnakan strategi digital agar tetap relevan dan efektif dalam ekosistem teknologi yang terus berkembang.
6. Libatkan Kepemimpinan: Pastikan bahwa pimpinan terlibat aktif, visioner dan menyelaraskan tujuan digital dengan tujuan organisasi.
7. Menjaga Komunikasi yang Transparan: Kembangkan lingkungan dengan komunikasi jelas dan terbuka, membangun fondasi transparansi yang membangun kepercayaan dan memfasilitasi transformasi digital.

PENUTUP

Dengan mengadopsi transformasi digital dan menerapkan prinsip-prinsip emas seperti pembelajaran berkelanjutan, keamanan data, dan keterlibatan kepemimpinan, pemerintah dapat memasuki era pelayanan publik yang efisien dan inovatif. Ini bukan sekedar upaya untuk memenuhi, melainkan langkah proaktif untuk menjawab harapan masyarakat dan membangun pondasi tangguh bagi masa depan penuh inovasi dan efektivitas.

REKOMENDASI

- Organisasi dapat meningkatkan pengembangan keterampilan digital dengan mengimplementasikan investasi strategis.
- Memastikan efisiensi dan adaptabilitas dalam proyek digitalisasi, dengan menerapkan *Agile Methodologies* sebagai pendekatan yang memastikan responsibilitas yang dinamis dan kesiapan dalam menghadapi perubahan.
- Meningkatkan aksesibilitas dan integrasi data antar sektor dengan melakukan *Break Down Data Silos*.
- Menunjukkan kepemimpinan yang aktif dan *visioner* sebagai bagian integral dari strategi korporatif.
- Meningkatkan transparansi komunikasi untuk memastikan informasi dapat disampaikan dengan jelas dan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Curtis, S. (2019). *Digital transformation - the silver bullet to public service improvement?. Public Money & Management*, 39(5), 322-324.
- Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2014). *Embracing digital technology: A new strategic imperative. MIT Sloan Management Review*, 55(2), 1.
- Gong, Y., Yang, J., & Shi, X. (2020). *Towards a comprehensive understanding of digital transformation in government: Analysis of flexibility and enterprise architecture. Government Information Quarterly*, 37(3), 101487.
- Greenway, A. et al. (2018). *Digital Transformation at Scale: Why the Strategy Is Delivery*, London Publishing Partnership.
- Nam, Taewoo. (2022). *ICT and Public Management Basic of Digital Government. Sungkyunkwan University*. 40.
- National Information Society Agency (2019), *Digital Transformation and Digital Government, Module I: Understanding of Digital Transformation and Government Reform*.
- McKinsey & Company (2023). *In digital and AI transformation, start with the problem, not the technology*.
- OECD. (2019). *The OECD Going Digital Summit: A Summary. Paris*. 4.